

**TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM  
TERHADAP KETERANGAN SAKSI AHLI  
DALAM PENETAPAN PERKARA PIDANA  
MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1981**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah

Oleh :

**MUHIBUDDIN BAIHAKI**  
NIM : C03206034

<b>PERPUSTAKAAN</b> IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS	No. REG
S-2011 009 SJ	S-2011/SJ/009
ASAL BUKU :	
TANGGAL :	

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel**  
**Fakultas Syariah**  
**Jurusan Siyasa Jinayah**

**SURABAYA**

**GADJAHBELANG**  
8439407-5953789

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : Muhibuddin Baihaki

NIM : C03206034

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Lumajang No. 50 Waruvinggo - Leces - Probolinggo

Menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul Tinjauan “Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keterangan Ahli Dalam Penetapan Perkara Pidana Dalam UU No. 8 Tahun 1981” merupakan karya asli milik saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat.

Surabaya, 14 Pebruari 2011

Yang Menyatakan,

METERAI  
TEMPEL

PAJAK PEMBANGUN BANGSA  
TGL. 20

BC786AAF588871919

ENAM RIBU RUPIAH

6000



DJP

  
Muhibuddin Baihaki

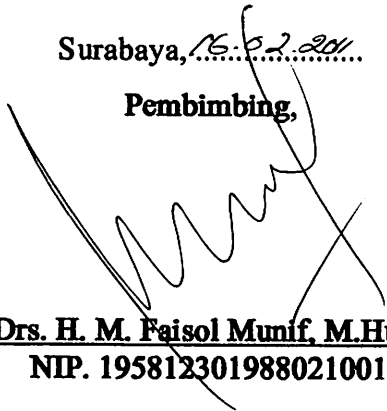


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Muhibuddin Baihaki** telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16-02-2011

Pembimbing,

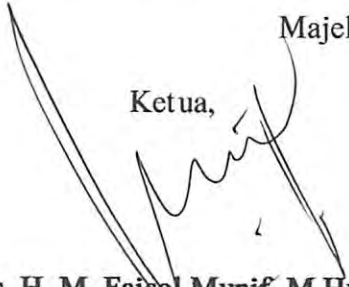
  
**Drs. H. M. Faisol Munif, M.Hum**  
**NIP. 195812301988021001**

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh **Muhibuddin Baihaki** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Ketua,

  
Drs. H. M. Faisal Munif, M.Hum  
NIP. 195812301988021001


Sekretaris,

  
Mahir Amin, M.Fil.I  
NIP. 197212042007011027

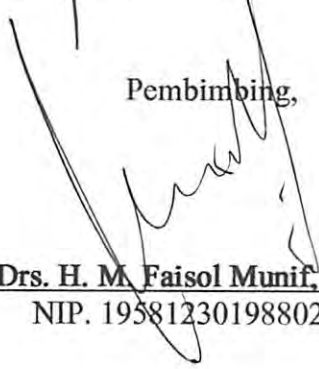
Penguji I.

  
Drs. Ach Yasin, M.Ag  
NIP. 196707271996031002

Penguji II,

  
Hj. Nurtailah, SE.,MM.  
NIP. 196205222000032001

Pembimbing,

  
Drs. H. M. Faisal Munif, M.Hum  
NIP. 195812301988021001

Surabaya, 24 Maret 2011  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag  
NIP. 195005201982031002

























Eksistensi keterangan ahli dibandingkan dengan alat bukti yang lain (keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa), dalam hal ini keterangan ahli sangat penting dalam hal pembuktian dimana dengan adanya saksi ahli agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pemeriksaan sehingga dapat membuat lebih terang suatu perkara pidana tertentu, akan tetapi bukan berarti alat bukti yang lain diabaikan. Semua alat bukti di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP kekuatan pembuktiannya sama sepanjang syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah terpenuhi, yang mana semuanya kembali lagi kepada pertimbangan hakim untuk menilai alat bukti mana yang akan dipakai. Implikasi yuridis dari keterangan ahli dalam penyelesaian perkara pidana tertentu yaitu dapat membuat terjadi atau tidaknya suatu delik pidana karena keterangan ahli dalam pembuktian suatu tindak pidana tertentu dapat meringankan (*saksi a de charge*) atau memberatkan (*saksi de charge*) seorang terdakwa akan tetapi semuanya kembali lagi kepada penilaian hakim itu sendiri guna mencari dan menemukan kebenaran materiil.

Sebagai suatu saran dari penulis mengingat pentingnya saksi ahli dalam hal pembuktian maka hendaknya aparat penegak hukum dalam memanggil saksi ahli tidak hanya satu orang saja akan tetapi mungkin dibutuhkan dua ahli atau lebih agar keterangan yang diberikan oleh para ahli tersebut cukup kuat dalam menemukan kebenaran materiil, dalam menilai dan memilih seorang ahli sebagai saksi hendaknya betul-betul cermat dan hati-hati agar tujuan dari hukum acara













































































Oleh karena itu, orang ahli sebagai saksi adalah wajib memberikan keterangan sebagai pemenuhan tugas jabatan atau atas perintah demi kepentingan persidangan untuk membantu menyelesaikan dan memeriksa bukti-bukti yang perlu dipahami hakim sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan.

Mengingat hal-hal tersebut di atas, maka keterangan saksi ahli sebagai alat bukti kedudukannya sebagai penjelasan dan khususnya terhadap keterangan saksi biasa adalah membuat terang serta menyimpulkan sepanjang mengenai saksi diam yang sudah nyata ada. karena sifatnya menjelaskan dan membuat terang maka keterangan saksi ahli tidak lain merupakan usaha maksimal mengenai hal-hal yang tidak dapat dipahami bila hanya didukung keterangan saksi biasa atau alat-alat bukti lainnya.

Dengan demikian adanya keterangan saksi ahli merupakan ijtihad hakim guna memperjelas dan membuat terang suatu perkara. Akan tetapi keputusan terakhir tetap berada di tangan hakim, mengingat hakimlah yang mempunyai otoritas penuh untuk memutuskan perkara.

Tetapi meskipun demikian, keputusan terakhir ada di tangan hakim. Hakim mempunyai kebebasan untuk memperhatikan atau tidak keterangan yang diberikan oleh orang ahli. Dengan kata lain, keterangan saksi ahli tidak mengikat sama sekali terhadap keputusan yang diambil oleh hakim.















































Mengingat hal-hal di atas, maka keterangan saksi ahli sebagai alat bukti atas bukti lainnya kedudukannya sebagai penjelasan baik terhadap keterangan saksi biasa maupun alat-alat bukti lain, serta membuat terang, karena sifatnya menjelaskan dan membuat terang, maka keterangan saksi ahli tidak lain merupakan usaha maksimal hakim mengenai hal-hal yang tidak dapat dipahami bila hanya didukung keterangan saksi biasa atau alat-alat bukti lainnya.

Dengan demikian adanya keterangan saksi ahli merupakan ijtihad hakim guna memperjelas dan membuat terang suatu perkara. Akan tetapi keputusan terakhir tetap berada di tangan hakim, mengingat hakimlah yang mempunyai otoritas penuh untuk memutuskan perkara.

Dengan begitu keterangan saksi ahli digunakan untuk membantu tugas hakim dalam memahami serta mencari bukti-bukti yang dapat memberikan keyakinan kepadanya.

#### **E. Peran Keterangan Saksi Ahli Di Persidangan**

Sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif. Hakim dalam mengambil keputusan tentang benar atau salahnya seorang terdakwa tidak hanya mengacu pada alat bukti yang sah menurut undang-undang yang berlaku saja, namun juga atas pertimbangan keyakinan hakim yang sesuai dengan hati nuraninya. Dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan, terdapat unsur-unsur yang harus ada dalam pemeriksaan











Dari deskripsi di atas bila dihubungkan dengan masalah persaksian, maka yang menggunakan ahli dengan ilmu pengetahuannya adalah sangat urgen di masa sekarang walaupun di masa-masa lalu, Islam tidak pernah membicarakan tentang hal ini yakni alat bukti keterangan saksi ahli terutama dalam perkara pidana. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, tingkat kesulitan yang akan ditemui dalam upaya pembuktian perkara akan semakin tinggi pula. Berbagai kemudahan dimunculkan untuk menyiasati kesulitan-kesulitan tersebut.

Maksud dari kemudahan di sini adalah kelonggaran dan keringanan hukum yang disebabkan adanya kesulitan, yakni jika kesulitan dalam mengungkap suatu kejahatan dengan hanya melibatkan alat-alat bukti yang biasa untuk mengungkap hal-hal yang sebenarnya ataupun untuk menerangkan sebab akibat timbulnya hubungan hukum, dan seorang ahli diyakini bisa membantu mengungkap hal-hal tersebut, maka keterlibatan seorang ahli dalam hal ini adalah suatu keharusan.

Sedangkan yang dimaksud dengan kesukaran mengandung unsur keterpaksaan dan kepentingan. Keadaan terpaksa berkenaan dengan keharusan dan kepentingan orang untuk menjaga agamanya, jiwanya dan harta miliknya dari kerusakan. Sedangkan yang dimaksud kepentingan adalah sesuatu yang menjadi kelaziman dan kelayakan hidup. Jika keterlibatan orang ahli bisa membantu menjaga agama, jiwa dan hak milik hidup. Jika keterlibatan orang ahli





Meskipun mereka orang-orang ahli yang tidak diragukan integritasnya dalam keahlian maupun pengetahuan yang dimilikinya, namun hakim tidak harus meyakinkannya bila keterangan mereka dirasakan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan hakim tidak memperoleh keyakinan darinya.

Dan suatu alat bukti tidak akan mempunyai kekuatan hukum apabila tidak memperoleh legitimasi dari hakim. Begitu pula dengan keterangan saksi ahli. Ia tidak lebih hanya sekedar penjelas bagi hakim mengenai sesuatu yang kurang atau tidak dimengerti oleh hakim. Tetapi dengan perkembangan zaman ini, keterangan saksi ahli seringkali dijadikan patokan bagi hakim dalam mengambil keputusan karena banyak hal yang berkembang pesat tanpa mampu para penegak hukum mengikutinya.

Oleh karena itu, penegak hukum harus selalu mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal dan dapat mengimbangi kejahatan yang mengikuti teknologi maju. Dalam hal inilah keberadaan orang ahli sangat urgen. Karena ia merupakan orang yang mempunyai spesialisasi dalam bidang tertentu yang sangat ia kuasai. Namun demikian, kehadiran orang ahli di persidangan harus dengan rekomendasi pengadilan.

Keterangan saksi ahli di persidangan ini pun kalau berhasil meyakinkan hakim tentang sebab akibat kejahatan, misalnya tidak bisa dijadikan satu-satunya sandaran bagi keputusan hukum, harus ada alat bukti lain yang menyertainya misalnya terdapat saksi atau pengakuan tersangka ataupun alat bukti yang lain.











